

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah dalam era reformasi sangatlah penting untuk dilaksanakan dan perlu di tingkatkan karena pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga tidak bisa lepas dari prinsip otonomi daerah. Amanah undang-undang agar pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Wujudnya adalah melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang diberlakukan mulai Januari tahun 2001 kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah tersebut merupakan kebijakan yang dipandang secara demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya.

Sebagai otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. UU tersebut kemudian di revisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Eksekutif) dengan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah (Legislatif). Dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 maka prinsip otonomi daerah mempunyai tujuan jelas yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat pada daerah tersebut. Otonomi daerah adalah hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsive terhadap kepentingan masyarakat luas. Desentralisasi bertujuan antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan serasi antara pusat dan daerah. Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.¹

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena hal ini merupakan kinerja pemerintah daerah sebagai mana fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat menuntut adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik karena peningkatan pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah.

Pemerintah dalam perkembangannya memberikan dana perimbangan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Salah satu komponen dana perimbangan tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

¹ Nurul Hidayah dan Hari Setiawan “ Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah “ (E – Jurnal , Universitas Mercubuana)

Penggunaan semua dana perimbangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah harus menggunakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan tersebut secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan standar pelayanan publik minimum serta di sajikan secara transparan dan akuntabel. Akan tetapi pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat seringkali di jadikan sumber dana utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari – hari, yang oleh pemerintah daerah di laporkan diperhitungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri².

Selain dari dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri sebagaimana dalam pasal 157 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dijelaskan, sumber pendapatan daerah terdiri atas, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli daerah di setiap daerah berbeda beda, hal ini di karenakan Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, sehingga daerah memiliki kekayaan alam yang melimpah dan maju di bidang industry serta perdagangan cenderung memiliki pendapatan asli daerah yang lebih tinggi di banding daerah lain nya. Hal tersebut mengakibatkan muncul nya kesenjangan dikarenakan adanya daerah

² Simanjuntak, “ Analisis Varian Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”, (Skripsi : Universitas Gajah Mada Yogyakarta 2002)

dengan pendapatan asli daerah tinggi dengan pendapatan asli daerah rendah. Kecenderungan ini membuat banyak terjadi ketimpangan antara daerah di Indonesia³.

Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak terlepas dari pengelolaan APBD secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja langsung dengan baik karena belanja langsung merupakan salahsatu keberhasilan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik.

Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah dapat menempuh dengan cara mengoptimalkan potensi penerimaan yang antara lain berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, DAU dan lain lain. Konsekuensi dari tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini, dalam hal ini erat kaitannya dengan belanja langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan servise kepada masyarakat seperti pengadaan barang dan jasa dalam rangka perbaikan jalan, jembatan, irigasi dan lainnya. Namun demikian di Banten masih belum meratanya jasa yang di berikan oleh kota atau kabupaten dalam memberikan servise yang berupa fasilitas umum, dimana masih kita temukan daerah yang minim dengan fasilitas yang di berikan oleh pemerintah.

UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pula bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana

³ Nila Aprilia dan Redo Arian Saputra, Pengaruh *Flypaper Effect*, Dana Alokasi Umum , Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia, dalam Jurnal Akuntansi Vol. 3 No 2 (2012)

perimbangan yang terdiri dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diatas diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel. Pemerintah dalam perkembangannya memberikan dana perimbangan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Salah satu komponen dana perimbangan tersebut adalah dana alokasi umum.⁴

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat melakukannya dengan intervensi langsung maupun melalui regulasi. Bentuk intervensi langsung antara lain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam sisi belanja negara, pemerintah dapat mendistribusikan sumber daya dengan cara

⁴ Nurul hidayah dan hary setiawaty, “ Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah, terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah” jurnal ilmiah, Vol. XVIII, No. 01 (jaunuari 2014), 46

melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga seluruh wilayah dapat menikmati secara adil.

Pemanfaatan anggaran belanja adalah untuk kepentingan penyediaan barang publik, karena hal ini juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial suatu daerah. Subsidi untuk kalangan lemah, pengeluaran untuk melakukan treatment terhadap kondisi ekonomi yang terganggu sehingga menjadi stabil kembali, juga untuk mencukupi kebutuhan modal dan investasi yang mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi suatu daerah.⁵

Periode	DAU	DAK	PAD	BL
2012	Rp. 530.833.38	Rp. 29.687.20	Rp 3.395.883.04	Rp. 2.017.161.96
2013	Rp. 617.081.10	Rp. 10.601.21	Rp 4.118.511.72	Rp. 1.979.069.49
2014	Rp. 728.490.01	Rp. 12. 538.48	Rp. 4.889.125.74	Rp. 2.178.547.76
2015	Rp. 640.981.00	Rp. 16.789.05	Rp. 4.972.373.62	Rp. 3.325.176.95
2016	Rp. 693.738.58	Rp. 1.998.321.33	Rp. 5.463.156.73	Rp. 3.089.817.73

Tabel 1.1 Data APBD 2012 – 2016 di Provinsi Banten

Sumber : BPS Provinsi Banten

Menurut peneliti terdahulu Nurul Hidayah dan Hari Setyawati dalam judul “ *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah* “, Dari hasil penelitian,

⁵ Novita Sari, “ Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 dalam Perspektif Ekonomi Islam”,(UIN Raden Intan Lampung 2018), 14.

DAU berpengaruh positive dan signifikan terhadap Belanja Langsung hal ini dikarenakan dengan DAU pendapatan dalam APBD meningkat sehingga akan meningkatkan belanja langsung. Penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa DAK berpengaruh negative terhadap Belanja Langsung. DAK tidak berpengaruh karena alokasi DAK di tiap-tiap kota dan kabupaten berbeda beda dan penggunaannya hanya untuk tujuan tertentu saja dan tidak di gunakan untuk belanja langsung melainkan untuk belanja tertentu yang sifatnya khusus seperti bencana alam, banjir dan sebagainya. PAD berpengaruh positive dan signifikan terhadap Belanja Langsung. Artinya apabila PAD meningkat, maka akan menyebabkan Belanja Langsung akan meningkat. Artinya bahwa PAD akan cenderung meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam hal pengeluaran rutin dan modal.

Namun dalam Tabel diatas bahwa DAU dan BL mengalami kenaikan dan penurunan dalam periode yang berbeda, sedangkan DAK mengalami kenaikan dan penurunan yang sama pada periode 2012 – 2015 sedangkan pada periode 2016 DAK mengalami kenaikan sedangkan BL mengalami penurunan, pada PAD setiap periode mengalami kenaikan berbeda dengan BL yg mengalami penurunan pada periode 2013 dan 2016.

Dari tabel diatas menunjukkan pada tahun 2015 DAU mengalami penurunan akan tetapi nilai BL nya tetap naik. dan pada tahun selanjutnya yakni tahun 2016 DAU mengalami kenaikan dan nilai BL nya mengalami penurunan. Jika dikorelasikan dengan penelitian terdahulu menurut Nurul Hidayah dan Hari Setyawati ada ketidak sinkronan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam sehingga peneliti fokus pembahasan dalam penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Provinsi Banten”**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah masalah sebagai berikut:

1. Besarnya Dana perimbangan yang diberikan oleh APBN untuk menjadikan suatu daerah menjadi lebih baik dan lebih sejahtera.
2. APBD yang dimiliki pemerintah daerah harus di belanjakan dengan baik agar otonomi daerah bias berjalan dengan baik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat sebagai berikut :

1. Bagaimana secara parsial pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung kab/kota di Provinsi Banten?
2. Bagaimana secara parsial pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung kab/kota di Provinsi Banten?
3. Bagaimana secara parsial pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung kab/kota di Provinsi Banten?

4. Bagaimana secara parsial pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli secara Daerah secara simultan terhadap Belanja Langsung kab/kota di Provinsi Banten?

D. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya penelitian yang dilakukan maka dalam penelitian ini peneliti membatasi variable-variable yang menjadi proyek penelitian. Untuk variable dependen adalah belanja langsung. Dan variable independennya adalah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten. Data yang akan digunakan dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Banten 2012 – 2016.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan penulis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung kab/kota di Provinsi Banten
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung kab/kota di Provinsi Banten
3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung kab/kota di Provinsi Banten tahun
4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung kab/kota di Provinsi Banten tahun

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Semoga dengan menulis penelitian ini, dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai ilmu ekonomi.
2. Semoga penelitian ini bisa dijadikan acuan, referensi, ataupun sebagai perbandingan dalam penelitian.
3. Semoga penelitian ini bias dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat atau daerah dalam membuat kebijakan ekonomi dalam menstabilkan kesejahteraan masyarakat.

G. Peneliti Terdahulu

Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk mempermudah penelitian dalam melakukan penelitian seperti membuat gambaran penelitian, mengolah data, dan membuat kerangka penelitian. Adapun ringkasan penelitian terdahulu yang telah penulis baca adalah sebagai berikut :

1. Nurul Hidayah dan Hary Setyawati dari Universitas Mercubuana Jakarta dengan Judul “ **Pengaruh besar Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Jawa Tengah**”

Tujuan dari penelitian di atas adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pemerintahan Daerah Pendapatan

di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kausal yang menentukan pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan pengujian asumsi of classical. Target khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan untuk kesejahteraan umum dari pengeluaran communitythroughdirect. Hasilnya dari hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, ada dua hipotesis adalah dampak yang signifikan, dan satu tidak berdampak signifikan Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Pemerintahan Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Langsung . Dana Alokasi Khusus tidak berdampak signifikan, target khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah dan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintahan Lokal.

Keseluruhan variable dari jurnal di atas dan skripsi penulis sama hanya saja yang membedakan dari tahun penelitian dan lokasi penelitian, jika dalam jurnal di atas meneliti di Provinsi Jawa Tengah sedangkan penulis lokasi Penelitian di Provinsi Banten

2. Uktiyah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten”**

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.

Terutama untuk kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah tersebut, dimana Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dapat memberikan menambahkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Besar nya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dapat memberikan dampak positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada daerah tersebut.

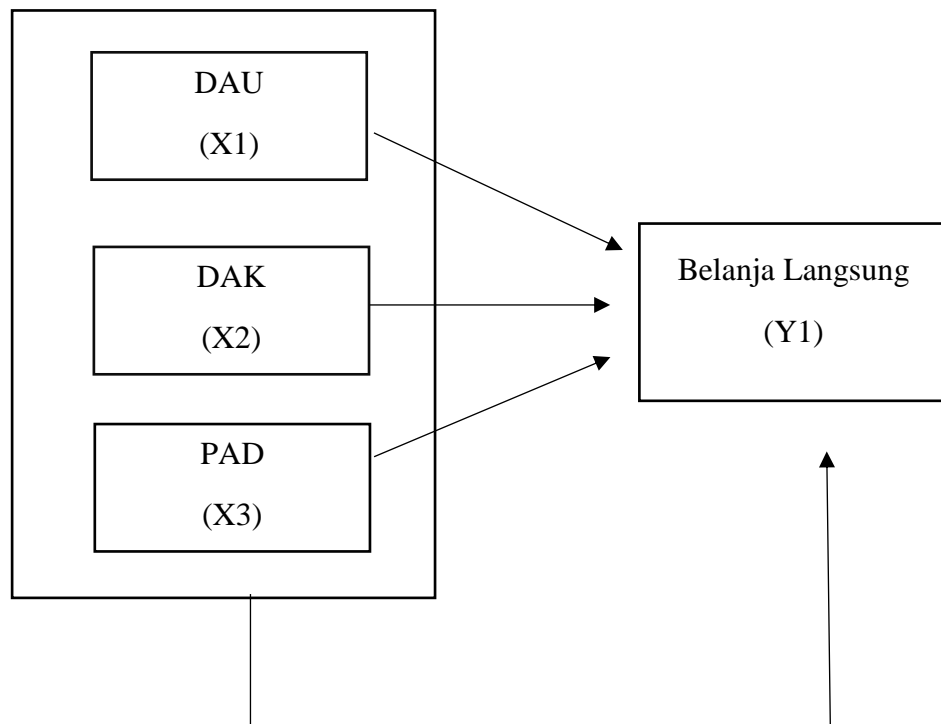
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2012 – 2016” metode yang digunakan dalam peneliian ini dengan menggunakan data sekunder, pengujiannya menggunakan uji normalitas, autokorelasi, heteroskedasitas, multikolinearitas. Dengan mennggunakan tehnik analisis regresi linier berganda, uji t (parsial), uji f (simultan) dan hasil dari penelitian ini adalah secara simultan DAU dan DAK tidak memiki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, DAK tidak berpengaruh sinifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terdapat pengaruh yang kecil, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat signifikan 3,1% yang berarti memiliki pengaruh kecil karna kurang dari 0,05 dengan nilai 0,031%.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan cara memecahkan masalah teoritis yang didasaari atas teori – teori. Kerangka pemikiran penelitian adalah belanja langsung

yang mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat dan bagaimana di belanjakan dengan baik.

Banyaknya anggaran yang ada dari DAU, DAK, dan PAD akan memengaruhi besarnya belanja langsung dalam sebuah pemerintahan untuk mengalokasikan dana atau belanja dengan baik dan tepat.



Gambar : 1.1

I. Hipotesis

Hipotesis berasal dari Bahasa Yunani, yaitu dari kata *hupo* dan *thesis*. *Hupo* artinya sementara atau masih lemah kebenarannya. Sedangkan *thesis* artinya pernyataan atau teori. Jadi, hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah

kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis.⁶

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variable – variable dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik.⁷

Adapun rumusan hipotesisnya yaitu :

1. HO = Tidak terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung.
H1 = Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung.
2. HO = Tidak terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Langsung.
H1 = Terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung.
3. HO = Tidak terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung.
H1 = Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung.

⁶ Tukiran taniredja, Hidayat Mustafidah. *Penelitian kuantitatif* Sebuah Pengantar (Bandung : Alfabeta, 2010), 32.

⁷ Kuncoro Mudrajad, *Metode Riset Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Jakarta : Erlangga, 2012), 59

J. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pertama yakni bagian pendahuluan, yang menulis dijadikan tolak ukur dalam langkah awal penelitian. Pada bab ini akan dibahas tentang langkah awal dalam menyusun laporan penelitian, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab kedua yakni bagian berisi tentang tinjauan pustaka yang akan membahas teori teori dan pemikiran pemikiran yang menghubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menjelaskan tentang dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan belanja langsung.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ketiga yakni bagian metode penelitian akan menjelaskan tentang metodologi penelitian berdasarkan pokok masalah utama untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang menguraikan tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sample, instrument penelitian, teknik analisis data, dan hipotesis statistic.

Bab IV : Simpulan Hasil Penelitian

Bab ini membahas uraian hasil penelitian berupa temuan temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahsan analisis dan terpadu.

Bab V : Penutup

Bab ini membahas tetntang kesimpulan mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil analisa data dan memberikan saran untuk pihak pihak terkait.